
EMPATI DAN GENUITAS DALAM POLITIK INDONESIA: MENEMUKAN KEMBALI “HATI” YANG HILANG

Yohanes Dopo Raga ^a, Patrisius Pemo ^b

^a STFT Widya Sasana, Malang, Indonesia

^b IFTK Ledalero, Maumere, Indonesia

E-mail: oandraga@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji fenomena hilangnya nurani dan genuitas dalam praktik politik di Indonesia. Masalah utama yang diteliti adalah kemerosotan nilai empati dan keaslian sikap para pemimpin politik yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan terputusnya relasi antara rakyat dan pemimpin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, untuk mengkaji konsep teoritis dan fenomena empiris yang berkaitan dengan empati, kepemimpinan politik dan kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa defisit empati dalam pengambilan keputusan politik cenderung melahirkan kebijakan yang menyimpang dan tidak mampu menjawab kebutuhan rakyat, sementara hilangnya genuitas menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Retorika politik yang lebih berorientasi pada pencitraan publik menjadi faktor utama dalam hal ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hilangnya dimensi nurani dan genuitas dalam kepemimpinan menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap situasi politik di Indonesia. Maka upaya pengembalian kepercayaan publik perlu ditingkatkan dengan menghidupkan kembali nilai-nilai empati dan keotentikan dalam praktik politik, agar politik dapat kembali menjadi instrumen untuk melayani dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan

Kata Kunci: Empati, Genuitas, Politik

ABSTRACT

This paper aims to analyze and examine the phenomenon of the loss of conscience and genuineness in political practice in Indonesia. The main problem studied is the decline in the values of empathy and authenticity of political leaders, which has resulted in a loss of public trust in the government and a breakdown in the relationship between the people and leaders. This study uses a qualitative method with a library approach to examine theoretical concepts and empirical phenomena related to empathy, political leadership, and public trust. The results show that a deficit of empathy in political decision-making tends to produce deviant policies that fail to address the needs of the people, while the loss of genuineness creates a crisis of public trust in the government. Political rhetoric that is more oriented towards public image is a major factor in this. Therefore, it can be concluded that the loss of the dimensions of conscience and genuineness in leadership has created a crisis of public trust in the political situation in Indonesia. Therefore, efforts to restore public trust need to be intensified by reviving the values of empathy and authenticity in political practice, so that politics can again become an instrument to serve and improve the welfare of the people, rather than being used as a tool to maintain power.

Keywords: Empathy, Genuinenes, Politics.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya kodrat sosial manusia, menuntut manusia untuk berpolitik. Hal ini dikarenakan manusia hidup bersama orang lain dan dalam kehidupan itu terdapat kelompok-kelompok sosial yang membutuhkan kehadiran seorang pemimpin dalam mengatur, mengarahkan dan menggerakkan kelompok hidup bersama tersebut. Dalam perkembangannya, pola kehidupan tersebut menuntut sebuah sistem tatanan yang stuktur dan teratur agar mampu menciptakan mutu hidup yang berorientasi pada kepentingan bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, cita-cita luhur tersebut mengalami pergeseran makna, karena adanya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh para pemegang jabatan politik atau pemerintahan yang menjadikan kepercayaan publik sebagai jalan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Krisis tersebut, secara tidak langsung juga menyerang dunia politik di Indonesia saat ini. Berbagai masalah terkait adanya isu ketidakpercayaan dan keterputusan antara pemimpin dan rakyat menyeruak di berbagai daerah di seluruh pelosok negeri ini. Sejarah ketatanegaraan di Indonesia sebelumnya juga telah menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan, dimana terlihat kekuasaan yang terpusat pada satu tangan atau satu lembaga saja, sehingga menimbulkan penyimpangan dalam praktek ketatanegaraan (Yani, 1945). Tentunya fenomena ini tidak terlepas dari adanya pergeseran fokus politik yang seringkali terjadi disorientasi dalam mewujudkan tujuan politik yang seharusnya. Tujuan politik yang sejatinya menghidupi semangat demokrasi, kini lambat laun beranjak pada orientasi untuk menghidupi semangat pencitraan, perebutan kekuasaan, mengumpulkan kekayaan, alih-alih pelayanan publik yang tulus (Sigar & dkk, 2025). Data Indonesia Corruption Watch (ICW) memperlihatkan dinamika demikian. Pada tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi di Indonesia dengan kerugian negara Rp 42,7 triliun. Pada tahun 2023 terjadi 791 kasus korupsi tetapi dengan kerugian negara yang menurun pada Rp 28,4 triliun. Lalu pada tahun 2024 jumlah kasus korupsi di Indonesia menurun drastis menjadi 364 kasus korupsi dengan kerugian negara yang melonjak hingga Rp 279,9 triliun (Yudistira et al., 2026). Data ini menunjukkan betapa maraknya kasus korupsi yang saat ini semakin memperburuk iklim politik Indonesia.

Selain itu, stigma negatif terhadap perkembangan politik juga seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Aristoteles berpendapat bahwa politik merupakan usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Mawartina et al., 2024). Jika dilihat berdasarkan realitas yang terjadi, relevansi pendapat ini cenderung melenceng karena disebabkan oleh isu-isu politik yang negatif serta kehilangan empati dan genuitas dalam berpolitik. Akibatnya, politik kehilangan “hati”-nya, untuk berempati dan bersikap jujur. Padahal dua nilai fundamental inilah yang seharusnya menjadi pilar utama dalam membangun fondasi kepemimpinan yang kuat dan berintegritas meski dihadapkan pada berbagai godaan kekuasaan. Menurut Zudan komitmen untuk bertindak jujur, adil dan transparan tanpa mengorbankan prinsip meskipun dihadapkan pada tekanan atau godaan kekuasaan merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan publik (Zudan Arif Fakrulloh, 2025).

Absennya empati dan genuitas dalam praktik politik di Indonesia, menjadi satu problem sekaligus tantangan bagi para pemimpin dan juga rakyat. Ketiadaan dua pilar penting ini bisa menciptakan jurang yang lebar, memicu polarisasi, dan mengikis etika bernegara. Politik yang seharusnya mengedepankan keseimbangan antara aspek rasional dan humanis dalam pengambilan sebuah kebijakan, justru menciptakan ruang ketidakstabilan antar keduanya. Para pelaku politik lebih cenderung mengedepankan aspek rasional, sehingga mengabaikan aspek humanis. Dengan kata lain, ketidaksesuaian rasionalitas tindakan dan keutamaan atau kualitas moral (Handoyo, 2016). Selain itu, pemicu ketimpangan politik juga disebabkan karena para calon pemimpin membeli suara rakyat (politik uang). Hal ini tampak ketika menjelang pemilu legislatif, insiden politik uang seakan menjadi jalur tersembunyi untuk mendapatkan target suara (Muhtadi, 2019). Maka tidak mengherankan jika sudah terpilih, keinginan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pra pemilu membuat banyak pejabat memilih jalur korupsi. Penyalahgunaan wewenang, kasus kekerasan dan penindasan di kalangan para pejabat pemerintahan yang pada umumnya menjadikan rakyat sebagai korban.

Fakta bahwa empati dan genuitas dalam dunia politik di Indonesia perlahan mulai memudar, sesungguhnya terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat, terutama para pelaku politik di Indonesia, bahwa politik juga dapat menjadi arena untuk refleksi dalam kehidupan sehari-hari (Putra & Riyanto, 2023). Bagi seluruh rakyat, ruang politik menjadi sarana untuk melihat dan menciptakan demokrasi yang lebih terorganisir secara baik. Sementara bagi para pelaku politik, arena demikian hendaknya menjadi ruang refleksi untuk menemukan, merumuskan, dan mengambil keputusan secara bijaksana demi kebaikan bersama seluruh rakyat. Setiap kebijakan yang diambil perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan masalah yang bisa berakibat fatal, layaknya peristiwa 25 Agustus 2025 lalu yang mempertunjukkan aksi demo besar-besaran di berbagai kantor gedung DPR di beberapa titik. Dikutip dari harian Kompas, Rabu 3 September 2025, demonstrasi yang terjadi merupakan manifestasi kekecewaan publik atas kinerja dan perilaku pejabat publik, terutama sejumlah anggota DPR. Kemarahan publik timbul sebagai bentuk protes terhadap keputusan DPR yang dinilai tidak bijaksana dan kurang menempatkan sikap empati terhadap situasi yang dialami rakyat Indonesia saat ini. Ketika rakyat merasa terhimpit oleh berbagai tekanan ekonomi, para pejabat justru menikmati euforia karena mendapat tunjangan yang begitu besar. Kekuasaan yang tadinya diletakan publik di atas pundak mereka yang diberi kepercayaan untuk memimpin rakyat, malah dipergunakan sewenang-wenang hanya untuk menumpuk kekayaan pribadi tanpa menaruh empati sedikitpun pada kondisi yang dialami rakyat kecil. Ditambah lagi tindakan kekerasan yang mengakibatkan banyak korban berjatuh akibat memperjuangkan aspirasi demi menyuarakan kebenaran. Dengan itu politik dipandang sebagai pertarungan kepentingan, bukan lagi dipertimbangkan dalam nilai-nilai yang beradab (Heriyanto, 2025). Selain itu, hubungan kerjasama antara kepentingan bisnis dan politik cenderung merugikan warga masyarakat. Keputusan yang diambil terkadang menguntungkan kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas (Mawartina et al., 2024). Sejalan dengan itu Armada Riyanto dalam bukunya menulis demikian, "Jika politik sekadar sebuah pertarungan kekuasaan dan kepentingan, tata politik dicabut dari posibilitas tercabutnya peradaban tata manunusiawi. Tata politik sekadar menjadi kisah-kisah buruk pertikaian sehari-hari." (Riyanto, 2011). Kenyataan ini menjadi bukti nyata bahwa publik sungguh merasa kecewa dengan politik di Indonesia yang kian hari mengalami disorientasi tujuan dan makna, karena perbuatan pejabat politik yang mengabaikan genuitas dan nurani. Kehilangan kepercayaan publik terhadap para pemimpin politik secara tidak langsung mereduksi nilai dan makna yang tertuang dalam lima sila Pancasila dan juga kehilangan makna yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak penyimpangan politik ini, gagasan UUD dan Pancasila hanya dijadikan sebagai tameng untuk menutupi tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh para pemegang tampuk pemerintahan. UUD dan Pancasila hanya dijadikan sebagai slogan pasif yang tanpa berusaha untuk mewujudkan nilai tersebut secara konkret.

Urgensi kedua nilai ini pada dasarnya bukan sekadar konsep etis yang utopis, melainkan prasyarat vital bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkeadilan sosial. Dengan empati memungkinkan eksplorasi diri seorang pemimpin yang genuine, dan dengan genuitas akan terbentuk karakteristik kepribadian yang tulus, jujur, dan terbuka (FX. E. A. Riyanto, 2018). Dalam konteks ini, teori relasionalitas yang dikemukakan Prof. Armada Riyanto kiranya menjadi salah satu kerangka acuan untuk memahami kedua konsep tersebut dalam ruang politik Indonesia. Untuk mengerti kedua konsep tersebut, pertama-tama perlu dipahami arti dari relasi yang menjadi pintu utama agar saling memahami satu sama lain. Relasi adalah perjumpaan diriku dengan yang lain, Aku (Self) bertemu dengan Aku-Yang-Lain (FX. E. A. Riyanto, 2018). Dalam ranah politik relasi yang dimaksud mengacu pada perjumpaan antara pemimpin dan rakyat.

Dengan demikian melalui kajian atas empati dan genuitas, tulisan ini bertujuan untuk menawarkan sebuah perspektif baru, bahwa untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memperbaiki citra politik yang kian memudar, para pemimpin harus mulai menanamkan kembali hati nurani yang jujur dan empati yang berorientasi pada kepentingan bersama. Bukan sebaliknya malah memanfaatkan kebaikan rakyat demi mencari keuntungan pribadi maupun golongan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kepustakaan, yang memungkinkan penulis mengeksplorasi secara mendalam berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dibahas penulis. Penelitian ini dimulai dengan studi literatur yang mendalam mengenai gagasan akan pentingnya empati dan genuitas dalam dunia politik. Selain itu, penulis juga menganalisis berbagai studi kasus yang telah dipublikasikan mengenai persoalan hilangnya sikap empati dan genuitas dalam dunia politik Indonesia, dalam buku-buku, jurnal ilmiah, koran, dan media sosial lainnya. Dengan pendekatan kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan timbulnya krisis kepercayaan publik terhadap para pemimpin. Lebih lanjut, tulisan ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan gagasan-gagasan untuk mengatasi krisis tersebut. Dengan mengedepankan kepemimpinan yang berempati dan otentik, politik di Indonesia dapat kembali menjadi instrumen untuk melayani dan bukan sekadar alat untuk mengejar kekayaan dan kekuasaan. Dengan begitu praktik politik akan menjadi lebih transparan dan publik akan menumbuhkan rasa percaya pada para pemangku kekuasaan, serta kepedulian para pemimpin akan situasi yang dialami rakyat menjadi lebih nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Memahami Empati dalam Konteks Politik Indonesia

Politik merupakan bagian integral dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana, aspek politik mencakup, pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan stabilisasi kehidupan sosial. Selain itu, politik juga dapat diartikan sebagai sebuah seni, karena politik menjadi sarana untuk mencapai segala yang telah direncanakan dan berusaha untuk meyakinkan orang lain tanpa menggunakan kekerasan. Bila ditelusuri lebih jauh, nilai-nilai politik mampu membuka ruang publik yang komprehensif dalam mengembangkan mutu hidup bersama. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa politik seringkali dianggap sebagai dunia yang penuh strategi, persaingan memperebut kekuasaan, dan manipulatif dalam menentukan kebijakan. Dilansir dari harian Kompas.com, 18 April 2026, kasus Ombudsman yang menyeret pejabat publik, Hery Susanto sebagai tersangka korupsi terkait tata kelola nikel menjadi salah satu ironi besar. Sebagai sebuah lembaga pengawasan pelayanan publik, kasus ini dianggap sebagai salah satu bentuk penghinaan terhadap rasa kepercayaan publik. Lembaga yang seharusnya menjaga moral pelayanan publik tetapi justru melanggengkan tindakan korupsi. Sebuah ironi yang mempertontonkan keserakahan dan kegagalan sistem seleksi pejabat yang justru memperburuk wajah politik Indonesia.

Di tengah hiruk pikuk kekuasaan dan persaingan tersebut, ada satu elemen yang sering terlupakan namun sangat krusial yakni “empati”. Empati merupakan bentuk pemahaman yang menggabungkan perasaan dan pikiran. Empati melibatkan integrasi hati dan pikiran daripada emosionalisme sederhana (Krause, 2010). Dalam konteks politik Indonesia, empati merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau politisi untuk merasakan dan memahami situasi yang dirasakan oleh rakyatnya. Ini bukan sekadar rasa kasihan, melainkan sebuah jembatan emosional yang menghubungkan pembuat kebijakan dengan realitas hidup masyarakat. Seorang pemimpin tidak hanya tinggal menetap di tahta kebesaran yang dipercayakan oleh rakyat, tetapi sungguh menghadirkan diri dalam setiap situasi dan keluh kesah rakyatnya. Memiliki sikap empati dalam membangun relasi dengan rakyat yang dipimpinnya, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi emosi afektif untuk saling memahami perasaan dan pengertian antara satu dengan yang lain (Muna et al., 2020). Berani keluar dari zona nyaman dan mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Mereka harus berinteraksi langsung dengan berbagai lapisan masyarakat tanpa sekat dan protokoler yang berlebihan. Menjalankan kewajiban sebagai perwujudan dari sikap tanggungjawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini seorang politisi ditantang untuk bisa melepaskan ego pribadi dan menempatkan sikap empati demi memenuhi tugas dan panggilannya untuk memimpin rakyat. Menurut pandangan Nussbaun sebagaimana dikutip Damayati bahwa seorang perlu membangun sikap imajinatif kreatif dalam membentuk sikap empati yang nyata. Imajinatif kreatif yang ditekankan ialah

membayangkan posisi penderitaan orang lain dan menempatkan diri kita ke dalam posisi penderitaan tersebut (Damayanti, 2021).

Dengan empati para politisi dan pemimpin menempatkan diri pada disposisi relasional yang memungkinkannya berada dalam fleksibilitas (FX. E. A. Riyanto, 2018). Artinya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di arena politik, aktor politik hendaknya mampu beradaptasi, menyesuaikan diri, serta merespon perubahan situasi atau tantangan baru di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, tidak mengorbankan prinsip-prinsip atau tujuan utama. Fleksibilitas ini merupakan salah satu tuntutan bagi mereka yang telah mendapat amanah publik untuk memimpin. Dengan adanya fleksibilitas dalam politik memungkinkan para pemimpin dan lembaga untuk menentukan kebijakan yang lebih pragmatis dan efektif dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan global yang terus berubah. Seorang aktor politik yang mampu berempati akan merumuskan kebijakan yang benar-benar relevan dan tepat sasaran. Mampu mendengarkan keluhan warga secara langsung tanpa prasangka, merumuskan kebijakan yang benar-benar memecahkan masalah rakyat, bukan sekadar proyek populis, serta merasakan kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat saat membuat kebijakan fiskal. Misalnya, saat membahas kenaikan harga bahan pokok, pemimpin yang berempati akan membayangkan bagaimana dampaknya terhadap ibu rumah tangga atau buruh harian. Dengan memahami kesulitan itu, maka para pemimpin akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan.

Di sisi lain dengan menempatkan empati sebagai salah satu prasyarat mutlak dalam pengambilan sebuah keputusan, seorang pelaku politik atau pemerintah mampu mengatasi narasi-narasi jahat yang mencoba mempengaruhinya untuk membuat keputusan yang keliru (Hammam & Noorizki, 2024). Dalam dunia politik sangat tampak dalam diri para politikus yang kelihatan fleksibel, tetapi di belakang layar justru bersikap plin-plan. Dilansir dari harian Kompas.com, 23 April 2026, kasus penggelapan jabatan yang menetapkan Abraham Santoso sebagai tersangka utama, merupakan salah satunya, di mana aksi kejahatan manipulatif dilakukan. Tersangka dituduh melakukan tindakan penggelapan jabatan dengan merekayasa pengadaan kemasan produk menggunakan purchase order (PO) fiktif. Manipulasi sistem yang terjadi sesungguhnya merupakan salah satu bentuk ketidakpedulian sosial, di mana pelaku memanfaatkan posisinya untuk melakukan kejahatan tanpa mempedulikan kerugian perusahaan dan karyawan yang lain. Pada awalnya sebagai seorang pemimpin ia kelihatannya mampu menjalankan tugas, namun kenyataannya justru inkonsisten karena tidak mampu berpegang pada prinsip apapun. Alhasil keputusan yang dikeluarkan justru melenceng dari harapan perusahaan dan banyak orang, hingga pada akhirnya menimbulkan sikap ketidakpercayaan publik.

Kesadaran akan pentingnya sikap empati, sesungguhnya merupakan pintu masuk untuk mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari rakyat. Ketika rakyat merasa pemimpinnya benar-benar peduli, bukan hanya berpura-pura, kepercayaan publik akan meningkat. Kepercayaan ini adalah modal sosial yang sangat berharga, yang memungkinkan pemimpin untuk mengajak masyarakat bekerja sama menghadapi tantangan, bahkan di masa-masa sulit. Ini adalah antitesis dari politik polarisasi, di mana empati menjadi obat penawar untuk permusuhan dan perpecahan. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu adanya dialog dan relasi yang terbuka antara para pemimpin dan rakyat. Adanya relasionalitas ini, memungkinkan terjadinya pertemuan empati yang menjadi nada dasar komunikasi inter-subjektif (FX. E. A. Riyanto, 2018). Dengan menumbuhkan kembali empati, kita dapat menemukan kembali "hati" yang hilang dalam politik Indonesia, menciptakan sistem yang lebih adil, manusiawi, dan benar-benar melayani rakyat. Dengan begitu harapan publik akan terciptanya demokrasi yang menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdampak positif pada kehidupan sehari-hari bisa terjawab.

Dengan demikian empati dalam konteks politik terutama di Indonesia menjadi sumber relasi positif antara masyarakat dan para pemimpin. Dengan berempati pemimpin mampu melihat warganya sebagai manusia yang utuh bukan sekedar angka statistik yang pasif. Tanpa empati, politik hanya dijadikan sebagai lahan transaksi kekuasaan. Hal ini dikarenakan para politisi menjadikan kekuasaan sebagai jalan untuk menimbun kekayaan pribadi tanpa mempedulikan nasib masyarakat yang dipimpinnya. Konflik hidup sosial sering terjadi karena kurangnya

kepekaan para pemimpin dalam menjawab suara rakyat. Ketika rakyat menyuarakan aspirasinya, para pemimpin bertindak seolah tidak menghiraukan jeritan rakyatnya. Hal inilah yang memicu terjadinya “losing trust” yang berakibat pada konflik sosial yang berkelanjutan.

B. Genuitas sebagai Fondasi Kepercayaan

Genuitas merupakan salah satu prinsip etika dalam dunia politik. Etika merupakan nilai-nilai moral yang menjadi landasan hidup manusia untuk mempertimbangkan baik dan buruknya sebuah tindakan dalam mencapai keutuhan hidup. Etika berpolitik merupakan pedoman hidup manusia dalam berpolitik agar mampu menciptakan kesejahteraan hidup bersama. Dalam berpolitik diterapkan juga nilai-nilai etika agar dapat menciptakan lingkungan politik yang transparansi dan kondusif bagi perkembangan hidup manusia. Tujuan etika politik ialah mempromosikan prinsip-prinsip etika yang digunakan untuk mengatur kegiatan berpolitik dalam masyarakat. Etika berpolitik mencakup aspek tanggung jawab atas tindakan politik dan legitimasi moral serta membuat aturan yang relevan dengan hidup masyarakat luas (Budiarjo et al., 2022). Oleh karena itu, nilai etika dalam berpolitik menjadi perekat dalam kelompok hidup bersama yang mampu menciptakan relasi sosial yang harmonis bagi perkembangan suatu negara.

Dalam praktik politik di Indonesia, etika dan genuitas merupakan satu kesatuan dalam menelusuri perkembangan politik. Etika menuntut kepatuhan seorang pemimpin pada prinsip, sedangkan genuitas menuntut agar prinsip tersebut dilakukan berdasarkan hati nurani bukan untuk pencitraan diri. Selain itu, dalam etika pejabat negara dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, dan dalam genuitas pemimpin bertanggung jawab atas siapa dirinya atau dikenal dengan istilah integritas diri. Dalam politik Indonesia integritas diri seorang pejabat politik yang bertindak berdasarkan hati nurani masih menjadi pertanyaan besar. Apakah tindakan dan kebijakan yang dibuat seorang pemimpin sungguh-sungguh didasarkan pada keprihatinan dan kepentingan bersama, ataukah hanya sekadar kedok untuk mencari simpati rakyat? Pertanyaan ini sekiranya menjadi titik permenungan bagi publik dan juga bagi para pejabat untuk melihat realitas politik Indonesia saat ini.

Lawrence Kohlberg mengukur perkembangan etis para politisi dengan mengangkat 5 poin utama yakni: *Pertama*, Materialisme praktis yang merujuk pada verbalisme dan ritual dimana orang mengakui peran Tuhan tetapi dalam kenyataannya mereka hidup seolah-olah tidak ada Tuhan (etsi Deus non daretur); *Kedua*, Pragmatisme yang menekankan bahwa seseorang sering mengucapkan janji-janji yang menggiurkan namun pada kenyataannya menempuh jalan pintas tanpa mengindahkan prinsip-prinsip yang dijanjikan dalam sumpah jabatan; *Ketiga*, Oportunisme menyuarakan obral janji sebelum pelantikan tetapi kemudian memanfaatkan posisi untuk memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan umum. Jika jabatan diperjual belikan maka pejabat cenderung merebut kembali dana yang telah dikeluarkannya untuk memperoleh jabatan; *Keempat*, Formalisme menyoroti penampilan luar yang terlihat memukau seperti tokoh panutan tetapi hanya secara munafik dan pura-pura tanpa hati nurani yang terusik. Hal ini tampak dalam kasus penindasan dan intimidasi yang dilakukan Bupati Bekasi. Dikutip dari harian Kompas 8 April 2026, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, HM Kunang (Ayah Bupati), dan Sarjan selaku pihak swasta sebagai tersangka atas kasus intimidasi terhadap salah seorang saksi dari tindakan korupsi yang mereka lakukan. Takut jika posisinya terancam, pelaku melakukan tindakan kriminal dengan menindas saksi bahkan membakar rumah milik saksi. Tentu ini menjadi sebuah tindakan brutal yang bermaksud menjaga citra sebagai seorang pemimpin, tetapi justru merusak wajah politik Indonesia. Bahkan melawan hak asasi manusia. Demikianlah politikus tanpa hati nurani yang menjalankan politik tanpa etika. Yang penting bukan keyakinan pribadi, melainkan citra baik dalam masyarakat; *Kelima* Positivisme hukum: bukan kebenaran dan keadilan melainkan kepentingan yang dijadikan sebagai tolak ukur. Kekuasaan yang menentukan bukan argumentasi. Hal ini tampak dalam kasus korupsi Kepala Dinas ESDM Jatim. Merujuk pada harian Kompas, 17 April 2026 KPK menetapkan Kepala Dinas ESDM Jatim dan beberapa tersangka lainnya sebagai pelaku tindakan korupsi dengan melakukan pungutan liar (pungli), gratifikasi, dan pemerasan di lingkungan Dinas ESDM Jatim. Dengan modus memenuhi persyaratan untuk mengurus administrasi, para pelaku sengaja memperpanjang urusan agar bisa

mendapatkan tambahan biaya dari masyarakat. Dalam hal ini keadilan yang seharusnya menjadi hak setiap warga dalam mendapatkan pelayanan, malah dimanipulasi demi mencari keuntungan pihak-pihak yang berkuasa. Demikian lima hal yang dikemukakan Lawrece tersebut menjadi cerminan bahwa politik menjadi kehilangan esensinya jika para politisi hanya mengejar citra diri, kepalsuan dan pemenuhan kepentingan golongan atau pribadi tertentu. Oleh karena itu, etika dan genuitas dalam bepolitik menjadi payung bagi perkembangan politik itu sendiri, agar kepercayaan masyarakat terhadap kaum politisi semakin berkembang.

Melihat realitas perpolitikan di Indonesia saat ini, banyak politikus yang terjerat kasus akibat lemahnya hati nurani untuk merasakan penderitaan rakyat. Banyak politikus yang kehilangan arah karena tergoda oleh kenikmatan jabatan dan kekuasaan. Maraknya kasus korupsi yang makin meningkat menunjukkan bahwa kesadaran para pelaku politik untuk bertindak berdasarkan hati nurani masih sangat lemah. Salah satu kasus yang saat ini menjadi sorotan publik Indonesia terkait lemahnya hati nurani seorang pemimpin dalam memperhatikan kepentingan publik adalah kasus pemerasan yang dilakukan bupati Tulungagung. Dilansir dari harian Kompas.com, 12 April 2026, penangkapan terhadap bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terkait kasus pemerasan terhadap ASN, menjadi momok mengerikan karena menimbulkan kekawatiran dan tekanan bagi korban. Tindakan pelaku yang memberikan ancaman pemecatan terhadap para ASN dan seluruh perangkat daerah apabila tidak menuruti perintah yang sejatinya mengarah pada tindakan penipuan, merupakan bukti konkret bahwa hati nurani seorang pemimpin telah tumpul akibat jabatan dan kekuasaan.

Genuitas dalam politik mengacu pada keaslian, ketulusan, dan kejujuran seorang pemimpin atau aktor politik. Terkait dengan cita-cita membentuk bangsa dan negara Indonesia yang lahir dari proses politik yang sehat, kejujuran dalam bepolitik mutlak menjadi landasan etisnya (Dwihantoro, 2013). Sayangnya, dalam praktik sehari-hari kejujuran seakan menjadi misteri yang sulit untuk diungkapkan dan ditampilkan dalam dunia politik. Bagi para aktor politik, berbicara soal kejujuran seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sensitif. Bahkan dianggap menjadi momok yang menakutkan untuk ditampilkan, tatkala mereka sedang bersembunyi di balik topeng kepalsuan. Dengan begitu kepalsuan seakan menjadi satu pola kebiasaan yang lazim untuk dilakukan. Bahkan dijadikan sebagai tembok untuk menutupi sifat ambisius, egois, tipu muslihat, dendam, dan rasa takut akan kebenaran (Muhammad & Hambali, 2021). Untuk itu berhadapan dengan kenyataan demikian, tugas para aktor politik adalah mengendalikan itu semua, agar tidak menciptakan persoalan yang lebih pelik. Jika tidak secepatnya ditanggulangi maka dapat memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik dan lembaga negara (Munandar & Susanti, 2025).

Prinsip genuitas dalam politik sesungguhnya menawarkan satu model etika yang harus dimiliki oleh para pelaku politik dalam mewujudkan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Ini bukan hanya soal apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka bertindak dan apakah tindakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan yang mereka tunjukkan. Sederhananya, genuinitas adalah keselarasan antara kata, perbuatan, dan niat. Jika berkaca pada realitas politik Indonesia saat ini, banyak kasus membuktikan bahwa keselarasan antara kata dan perbuatan dari para pelaku politik masih sangat minim. Para pelaku politik yang pada awalnya menjanjikan banyak hal agar terpilih menjadi pemimpin, justru bertindak melenceng dari kata-kata yang pernah diucapkannya setelah menduduki kursi jabatan. Hal ini nyata dalam diri para pejabat, yang seringkali menawarkan banyak janji tetapi justru mengkhianati janjinya sendiri. Misalnya dalam kasus korupsi yang pernah melibatkan anggota Komisi V DPR. Dikutip dari harian TEMPO, 14 Januari 2016, terkait kasus korupsi yang dilakukan Damayanti Wisnu Putranti terkait proyek jalan di Maluku. Meski kasus ini sudah terjadi sekian lama, namun tetap menyimpan bekas di benak masyarakat Maluku dan menghancurkan rasa kepercayaan masyarakat. Walaupun mungkin situasi saat ini telah berubah, namun peristiwa yang pernah membekas ini menunjukkan bahwa integritas seorang pemimpin dalam menjalankan amanah rakyat, seringkali hancur dalam waktu sekejap ketika ego untuk meraup keuntungan pribadi mendominasi hati nurani. Tindakan demikian tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan

sosial, mengganggu pembangunan nasional, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan (Hidayat et al., 2025).

Oleh karena itu genuitas dalam berpolitik menjadi kompas moral dalam menyelaraskan, nilai pribadi, ucapan dan tindakan diruang publik. Genuitas dalam berpolitik terutama politik di Indonesia menjadi dasar bagi para pejabat negara untuk bertindak sesuai dengan etika dan moral agar mampu meminimalisir konflik yang terjadi antara pejabat dan warga negaranya. Kehilangan kepercayaan dalam berpolitik terkadang terjadi karena adanya penyimpangan antara ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin. Pemimpin cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu dibandingkan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, politik mesti dipahami sebagai perjuangan bersama, agar tindakan dan keputusan yang diambil tidak menyeleweng dari situasi sosial masyarakat.

C. Menemukan Kembali "Hati" yang Hilang

Politik, di mata sebagian besar masyarakat Indonesia, sering kali terasa kering, gaduh, dan jauh dari kata bijaksana. Di tengah hiruk pikuk intrik kekuasaan, perebutan jabatan, dan skandal yang tak berkesudahan, muncul satu pertanyaan mendasar: Ke mana perginya "hati" dalam politik kita? "Hati" yang dimaksud di sini bukanlah organ fisik, melainkan esensi dari etika, moralitas, empati, dan pengabdian tulus yang seharusnya menjadi fondasi bagi setiap pengambil keputusan dan pemimpin. Etika, moral dan empati adalah paket dasar yang mampu memberikan ketenangan dalam dunia politik sebab, nilai-nilai yang terkandung di dalam tiga aspek tersebut mampu mengukur perkembangan politik itu sendiri dan *feedback* yang diberikan bagi perkembangan hidup masyarakatnya. Hari ini, politik Indonesia tampak terlalu didominasi oleh kalkulasi pragmatis, kepentingan kelompok, dan ambisi pribadi, membuat nilai-nilai luhur Pancasila terasa terpinggirkan. Hal ini berakar pada kesadaran moral yang semakin memudar, yang sesungguhnya berakar pada lagu lama: koruptor sudah tidak lagi dihinggapi beban hati karena nurani sudah mati (Saeng, 2015). Hati nurani yang sesungguhnya menjadi dasar pertimbangan moral dan etika manusia untuk bertindak sebagaimana mestinya, dikalahkan oleh kekuatan egoisme yang dominan, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan dan menciptakan sandiwara publik yang meyakinkan.

Menemukan kembali "hati" yang hilang dalam diri para pelaku politik di Indonesia saat ini bukanlah sekadar seruan moral, tetapi sebuah keharusan reformatif. Ini berarti kembali pada esensi politik yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, yakni politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Politik yang berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Politik yang tidak hanya menaruh perhatian pada perumusan kebijakan yang pada akhirnya berpihak pada kaum elite, melainkan politik yang juga berpihak pada rakyat kecil. Sebab, kesadaran dan kehendak untuk berpihak kepada rakyat adalah modal dasar dalam berpolitik supaya segala cara yang digunakan untuk berpolitik tidak menyalahi konsep kebaikan bersama (*bonum commune*) (Reynaldo et al., 2025). Kebaikan bersama, pada dasarnya mencakup seluruh elemen kehidupan. Ia tidak berpihak hanya pada golongan tertentu melainkan meresap dalam seluruh proses kehidupan manusia. Ia tidak berpihak pada kelompok yang memiliki kekuasaan melainkan pada kebenaran hidup yang dihidupi oleh semua orang. Oleh karena itu, prinsip *bonum commune* ialah mengharagai setiap pribadi manusia tanpa terkecuali.

"Hati" yang hilang sesungguhnya mengisyaratkan kepada seluruh pelaku politik bahwa landasan utama untuk menjadi seorang pemimpin adalah kepekaan menggunakan hati nurani untuk mendengarkan jeritan rakyat yang telah lama menagih janji. Keberpihakan pemimpin terhadap jeritan rakyat menjadi jawaban bahwa hati nurani masih menempati posisi yang utama. Seruan untuk kembali menata hati, sesungguhnya menjadi kerangka acuan yang mengharuskan seorang pemimpin untuk bertanggung jawab secara moral terhadap diri sendiri dan publik dalam pengambilan sebuah keputusan (Malik et al., 2023). Pemimpin harus bertindak adil dan jujur, serta menjaga kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Pemimpin hendaknya, menjadi pribadi yang mampu mengayomi, mengarahkan dan menjadi tempat keluh kesah publik, bukan sebagai ajang untuk membangun citra diri di mata publik dan menyembunyikan perilaku kotor yang menguntungkan pribadinya. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang

sering kali diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi (Andika Dwi Putra et al., 2024). Dengan berpegang teguh pada prinsip demikian, seorang pemimpin mampu menciptakan situasi politik yang penuh dengan keharmonisan, jauh dari kata manipulatif dan terhindar dari tindakan koruptif.

Menemukan kembali "Hati" yang hilang merupakan sebuah perjalanan kolektif. Perjalanan kolektif itu sendiri berarti perjalanan yang merangkul nurani para pemangku kekuasaan dan jeritan rakyat yang mendambakan keadilan, sehingga menciptakan ruang dikusi yang baik bagi perkembangan hidup sosial masyarakat. Ini adalah harapan untuk melihat kembali politik Indonesia sebagai arena pengabdian, di mana etika mendahului elektabilitas, dan empati mengalahkan ambisi. Hanya dengan begitu, tujuan hakiki dari bernegara, mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat senantiasa dapat benar-benar terwujud. Perjalanan kolektif diandaikan apabila setiap elemen masyarakat mampu menyuarakan aspirasinya dan mendapatkan tanggapan positif dari para pemimpinnya sehingga menciptakan transformatif hidup bersama yang saling memahami, saling menghargai dan saling mendukung.

Menemukan hati yang hilang merupakan salah satu cara dalam memurnikan kembali kepercayaan publik terhadap pemegang tampuk pemerintahan. Hal ini dapat terjadi apabila empati dan genuitas dalam berpolitik menjadi kompas hidup bersama. Empati tanpa genuitas sama dengan manipulasi. Hubungan ini muncul dan berakar kuat apabila para politisi menyadari sisi kemanusiaannya serta berani untuk berbuat sesuai dengan janji-janji yang diungkapkannya. Pemimpin akan menemukan kembali simpati rakyat apabila ia mampu menggunakan kesempatan dengan baik dalam menjalankan sistem kepemimpinan yang transparansi dan akuntabel tanpa didominasi oleh pemuasan kepentingan pribadi atau kelompok sosial tertentu. Maka dari itu untuk menemukan hati yang hilang menjadi keharusan bagi para pemegang kekuasaan di tengah krisis moral, etika dan empati dalam dunia politik, secara khusus di Indonesia. Hal ini menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pemimpinnya dalam memurnikan kembali krisis relasi yang bersifat manipulatif. Pemimpin hendaknya hadir sebagai figur yang menjadi penunjuk arah hidup tanpa memakai topeng manipulatif dalam mengeksploitasi kepercayaan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa politik Indonesia saat ini sedang mengalami krisis etika dan kepercayaan publik akibat dominasi kalkulasi pragmatis dan ambisi kekuasaan yang mengesampingkan nurani. Kegagalan ini menunjukkan hilangnya "hati" dalam politik, yaitu empati (kemampuan untuk merasakan penderitaan rakyat) dan genuitas (ketulusan atau keaslian niat untuk mengabdikan tanpa memiliki maksud terselubung didalamnya). Politik yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama, justru berbalik pada pencapaian kesejahteraan segelintir orang saja. Untuk itu perlu adanya pembaharuan yang mengedepankan aspek moral dan etika.

Empati dan genuitas merupakan titik dasar bagi pemurnian perkembangan politik ditengah krisis etika dan moral yang berkepanjangan. *Losing trust* publik terhadap para pemimpin politik, secara tidak langsung memberikan dampak negatif bagi perkembangan politik di Indonesia. Para pemimpin hendaknya menyadari bahwa situasi konflik sosial yang terjadi (demo dll) merupakan bentuk protes masyarakat terhadap ketimpangan keputusan oleh para pemimpin yang cenderung mengedepankan kepentingan elit politik. Situasi ini secara tidak langsung menciptakan tembok pemisah antara pemimpin dan rakyatnya. Oleh karena itu, perlu adanya penemuan kembali sikap hati yang terbuka dan tulus dalam melayani.

Penemuan kembali "hati" yang hilang ini merupakan keharusan mutlak. Hal ini menuntut para elite politik untuk melakukan restorasi moral, mengubah pandangan bahwa jabatan adalah transaksi menjadi amanah pengabdian, serta memprioritaskan keadilan sosial di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pada akhirnya, restorasi ini memerlukan kolaborasi, yakni keteladanan dari pemimpin, ketegasan hukum yang tidak pandang bulu, dan kekuatan pengawasan yang berkelanjutan dari masyarakat sipil. Hanya dengan menempatkan kembali empati dan genuitas

sebagai fondasi, politik Indonesia dapat kembali menjadi arena yang bermartabat dan efektif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Dwi Putra, Zahir, R., Razak, S. A., & Kurniati. (2024). Kontribusi Etika Politik Islam Terhadap Penyelesaian Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.58540/jipsi.v3i2.583>
- Budiarjo, T., Andre, H., Yani, Y., & Stepen, A. (2022). Etika Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat Menurut Pandangan Machiavelli. *In Theos : Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*. 2(1), 28–33. <https://doi.org/10.56393/intheos.v2i1.1262>
- Damayanti, C. (2021). Imajinasi untuk Merawat Kemanusiaan: Pemikiran Martha Nussbaum dalam Pendidikan Humaniora. *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, 21(1). <https://doi.org/10.35312/spet.v21i1.328>
- Dwihantoro, P. (2014). Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik. *Politika*, 4(2), 13–21. <https://doi.org/10.14710/politika.4.2.2013.13-20>
- Hammam, F. Y., & Noorizki, R. D. (2024). Empati: Jalan Mengurangi Konflik pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. *Flourishing Journal*. <https://journal3.um.ac.id/index.php/psi/article/view/4633>
- Handoyo, E. dkk. (2016). Etika Politik. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Widya Karya Press.
- Heriyanto. (2025). Politik Hukum di Era Pemilu yang Jujur dan Adil. *Jurnal riset rumpun ilmu sosial, poilitik dan humaniora*, 4(3), 157. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5716>
- Hidayat, S., Azizah, A. N., Angriani, F. S., & Bahtiar, M. A. I. (2025). Tindak pidana korupsi di Indonesia: bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 402–411.
- Krause, R. S. (2010). No Title Empathy, Democratic Politics, and the Impartial Juror. *law, culture and the humanities*, 7(1). <https://doi.org/10.1177/1743872109355567>
- Malik, A., Rahim, A., & Taufiqurachman, T. (2023). Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun dalam Implementasinya di Indonesia. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3599–3610. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2003>
- Mawartina, J., Siregar, A. C., Nursuhayla, R., & Manurung, K. I. (2024). Interaksi Bisnis Dan Politik Di Indonesia : Analisis Permasalahan dan Dampaknya terhadap Kebijakan Publik. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan , Politik, dan Sosial Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3405>
- Muhammad, N. A., & Hambali, R. Y. A. (2021). Kejujuran Dan Etika Dalam Konsep Politik Machiavelli. *Jurnal Perspektif*, 5(1), 57. <https://doi.org/10.15575/jp.v5i1.115>
- Muhtadi, B. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 55–74. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Munandar, A., & Susanti, E. (2025). Politik Identitas Dalam Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Politik Sosial di Indonesia). *JIPSH: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.58472/jipsh.v1i1.20>
- Putra, G. B., & Riyanto, F. X. A. (2023). Menelisik politik identitas di Kalimantan Barat berdasarkan perspektif filsafat politik Armada Riyanto. *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.26418/jdn.v1i1.64948>
- Reynaldo, E., Adiman, G. G. G., & Alan M, A. (2025). St. Vinsensius a Paulo sebagai “Politikus Handal” di Perancis: Tinjauan Teologi Kontekstual Bagi Politik Indonesia. *Serikat Kecil: Jurnal Studi Spiritualitas Vinsensian*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.35312/2epc9760>
- Riyanto, A. (2011). *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI).
- Riyanto, A. (2018). *RELASIONALITAS, Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: PT KANISIUS.
- Saeng, V. (2015). Epidemi Korupsi dalam Palagan Kepentingan Ideologis: Quo Vadis Indonesia? *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, 15(1), 30–49.

- <https://doi.org/10.35312/spet.v15i1.62>
- Sigar, D. V. A., & Dkk. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam Lembaga Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 15(5). <https://nusantarahanajournal.com/index.php/nhj/article/view/259>
- Yani, A. (1945). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 55–68. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135>
- Yudistira, K. A., Saputri, N. D., Oktavia, S., & Ariyanti, D. S. (2026). Analisis pemberitaan kasus korupsi di Indonesia di Tempo.co tahun 2022-2024. *Jurnal Kajian Dimensi Sosiologi*, 15(01), 47–58. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v15i1.92602>